

Tabel 7.2
CASCADING PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

RPJMD KABUPATEN MAGELANG 2019-2024					RPJMD & RENSTRA			RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH									
VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULA	SASARAN RPJMD/TUJUAN SKPD	INDIKATOR SASARAN/TUJUAN	FORMULA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN			
					Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Cakupan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	$(\text{Jumlah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang tersusun} / \text{Jumlah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang seharusnya}) \times 100\%$	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Prosentase Perumusan Kebijakan Pemerintahan yang dijalankan	$(\text{Jumlah Perumusan Kebijakan Pemerintahan yang dijalankan} / \text{Jumlah Perumusan Kebijakan Pemerintahan yang seharusnya}) \times 100\%$	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	1. Jumlah Desk Pikada dan Desk 2. Jumlah Fasilitasi Pelantikan KDH/WKDH dan Pengadaan Pakainan Bupati/Wakil Bupati 3. Jumlah Fasilitasi kegiatan APKASI dan FORSEDASI			
									2. Cakupan penyusunan produk hukum daerah, penanganan permasalahan hukum dan pendokumentasian produk hukum daerah	$(\text{Jumlah produk hukum daerah yang tersusun} / \text{Jumlah permasalahan hukum yang didamping} / \text{Jumlah permasalahan hukum yang masuk} / \text{Jumlah produk hukum daerah yang dikelola} / \text{Jumlah produk hukum daerah yang seharusnya dikelola}) \times 100\% / 3$	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1. jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 2. Jumlah Fasilitasi Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Dnerah 3. Jumlah Dokumen unsur Rupabumi yang Nama-namanya Telah Dibakukan			
									3. Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	$(\text{Jumlah dokumen Pengelolaan Bina Mental Spiritual} + \text{Jumlah dokumen Evaluasi pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan sosial} + \text{Jumlah dokumen Evaluasi pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan sosial} + \text{Jumlah dokumen Evaluasi pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan sosial} + \text{Jumlah dokumen Evaluasi pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan sosial}) \times 100\%$	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen evaluasi pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pelaksana Otonomi Daerah	1. Jumlah Dokumen LPPD 2. Jumlah Laporan SPM 3. Jumlah Dokumen LKPJ			
													Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen Kerjasama Daerah			
													Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah dokumen Kerjasama Luar Negeri			
													Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum daerah	1. Jumlah Dokumen Propempera 2. Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum Daerah			
													fasilitasi Bantuan Hukum	1. Jumlah konsep kesepakatan bersama dan atau perjanjian kerjasama 2. Jumlah Laporan Capaian Aksi HAM dan penilaian Kabupaten Kota Peduli HAM 3. Jumlah permasalahan hukum Litigasi dan Non Litigasi 4. Jumlah Penyuluhan Hukum			
													Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	1. Jumlah Produk Hukum Daerah 2. Jumlah dokumen Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan			
													Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah kebijakan kesra dan kemasyarakatan bidang agama. Jumlah Bulan Pengelolaan Islamic Center			
													Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan sosial terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen kebijakan kesra dan kemasyarakatan bidang kesejahteraan sosial			
													Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan kebijakan kesra dan kemasyarakatan bidang perlindungan perempuan dan anak, Pendidikan, kebudayaan dan Pariwisata Pemuda dan Olahraga			
													Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			
													Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah fasilitasi koordinasi pengendalian dan distribusi perekonomian			
													Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah fasilitasi dan koordinasi perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil			
													Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD			
													Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan BUMD			
													Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan			
									1. Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi	$(\text{Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan evaluasi terkait kebijakan Perekonomian yang dijalankan} / \text{Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan evaluasi terkait kebijakan Perekonomian yang seharusnya yang dijalankan}) \times 0,6 + (\text{Jumlah dokumen pemantauan kebijakan sumber daya alam yang tersusun} / \text{Jumlah dokumen pemantauan kebijakan sumber daya alam yang seharusnya tersusun}) \times 0,4) \times 100\%$	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah koordinasi terkait kebijakan Perekonomian yang dijalankan					

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, berdaya saing dan amanah (SEDAYA AMANAH)

MISI III

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah

Meningkatnya kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntable

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Peraturan Menteri PAN-RB No. 14 Tahun 2014 ttg Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai AKIP	Permenpan 12/2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
----------------------------------	---	---	------------	---

Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan ekonomi dan pembangunan	Cakupan perumusan kebijakan ekonomi dan Pembangunan	(Jumlah perumusan ekonomi dan Pembangunan yang tersusun / Jumlah perumusan kebijakan ekonomi dan Pembangunan yang seharusnya) x 100 %	Program Perekonomian dan Pembangunan
--	---	---	--------------------------------------

2. Cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	(Jumlah pedoman perencanaan pembangunan yang tersusun / Jumlah pedoman perencanaan pembangunan yang seharusnya) x 100%	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen Administrasi pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
--	--	--------------------------------------	---	--	---

3. Tingkat Kematangan UKPEJ.	Peraturan Kepala LKPP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit kerja Pengadaan Barang /Jasa. DO : Jumlah variabel yang telah mencapai level 3 (proaktif) / Jumlah variabel kematangan keseluruhan.	Pengetolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah SKPD yang difasilitasi pengadaan barang dan jasanya	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
------------------------------	--	---------------------------------------	--	---	--

Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya	Jumlah dokumen pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen Administrasi pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen fasilitasi perencanaan program pembangunan
				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah dokumen fasilitasi perencanaan program pembangunan
				Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pelaporan administrasi pembangunan yang tersusun : laporan perkembangan kegiatan APBD, Bankeu dan DAK
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pengadaan barang dan jasa yang dilayani
				Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah layanan pengadaan secara elektronik yang dikelola
				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1. Jumlah lembaga pengadaan barang dan jasa yang terbina / teradvokasi 2. Jumlah pelaku pengadaan barang dan jasa yang terbina / teradvokasi
				Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1. Jumlah dokumen evaluasi kelembagaan 2. Jumlah dokumen evaluasi jabatan 3. Jumlah dokumen standart kompetensi jabatan
				Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1. Jumlah dokumen ketatalaksanaan perangkat daerah 2. Jumlah dokumen Proses Bisnis perangkat daerah

1. Prosentase ketercapaian penataan organisasi	(Jumlah dokumen kelembagaan dan anjab yang disusun / jumlah dokumen kelembagaan dan anjab yang seharusnya) + (jumlah dokumen pelayanan publik dan ketatalaksanaan yang disusun / jumlah dokumen pelayanan publik dan ketatalaksanaan yang seharusnya) + (jumlah dokumen kinerja dan reformasi birokrasi yang disusun / jumlah dokumen kinerja dan reformasi birokrasi yang seharusnya) / 3 x 100%	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen penataan organisasi	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1. Jumlah unit pelayanan publik yang melakukan survei kepuasan masyarakat 2. Jumlah inovasi Pelayanan publik yang diikutsertakan dalam lomba
--	---	---------------------	------------------------------------	--	---

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1. Jumlah dokumen penetapan perjanjian kinerja, Rencana aksi PK dan Rencana Kerja Tahunan 2. Jumlah dokumen/ bahan laporan kinerja
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1. Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi 2. Jumlah dokumen Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 3. Jumlah pengembangan Zona Integritas 4. Jumlah pengembangan Budaya Kerja

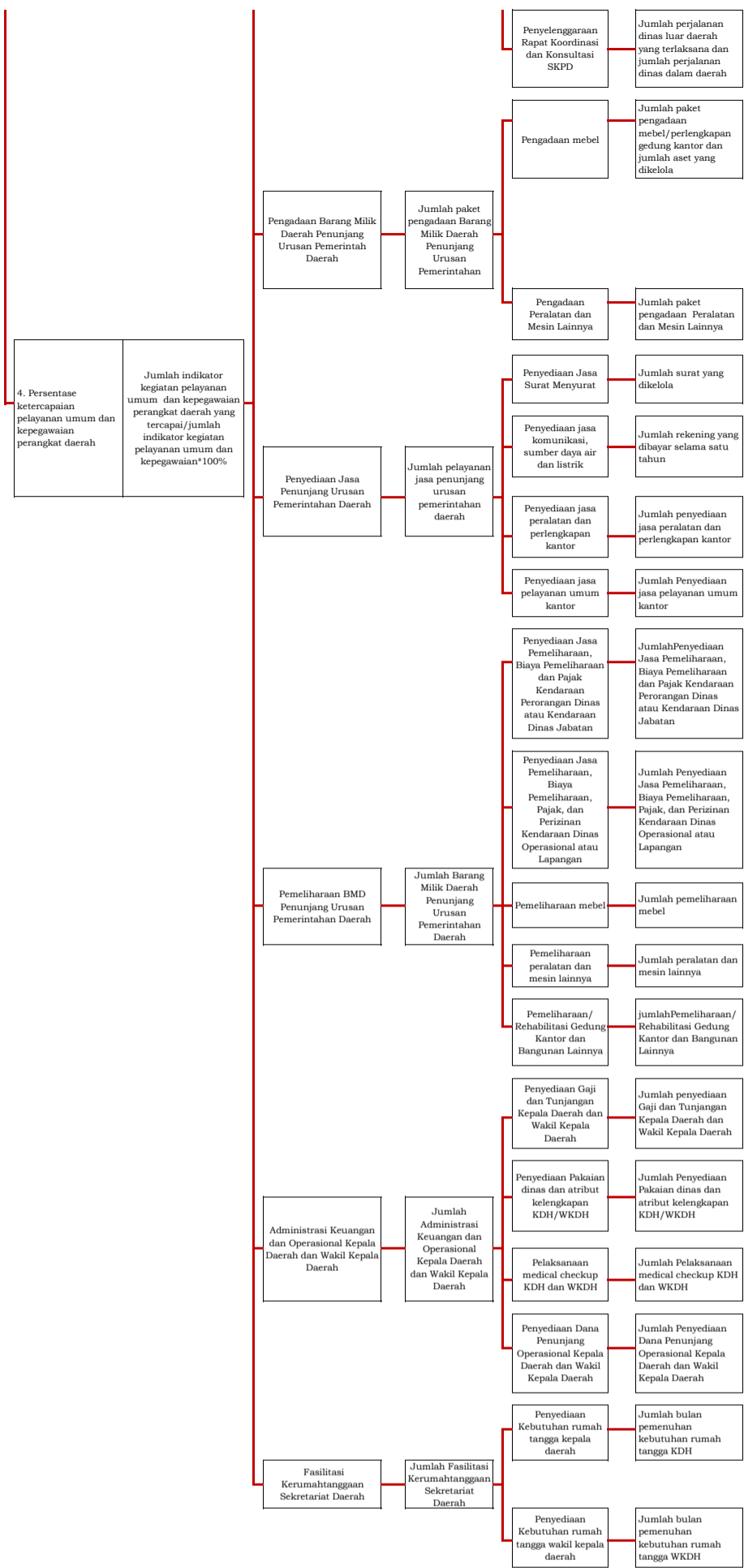
Meningkatnya kualitas administrasi umum kesekretariatan daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Permenpan RB nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
--	--	--	---

2. Cakupan Kinerja Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	(Jumlah Fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang terlaksanakan/ Jumlah Fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang seharusnya) * 100%	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah fasilitasi keprotokolan
---	--	--	--	-------------------------	--------------------------------

				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah fasilitasi komunikasi pimpinan dan kemitraan dengan insan media
				Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah fasilitasi pendokumentasian
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Renstra PD 2. Jumlah Dokumen Renja Pd yang tersusun
				Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun 2. Jumlah dokumen NSPK yang tersusun
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen laporan tribulanan 2. Jumlah dokumen laporan bulanan

3. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan PD	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi kinerja OPD, dan keuangan yang tersusun/ jumlah dokumen perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan yang seharusnya * 100%	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan yang dikelola
--	--	--	--	--	-------------------------------

				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan penatuaasaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
					Jumlah bulan pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
					Jumlah cinder mata dan karangan bunga yang tersedia selama satu tahun
					Fasilitasi Kunjungan Tamu
					Jumlah rapat dinas dan penerimaan tamu pemerintah daerah




 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN MAGELANG,
 Drs. ABU WARYANTO
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19660304 199203 1 007